

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI yang berada paling depan yang bertugas memberikan pelayanan kepada mitra kerja yang berada di wilayahnya. Sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap pelayanan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan bendahara dan kuasa bendahara umum yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan membukukan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah memerlukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan kegiatan dan pengguna anggaran. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh pelaksanaannya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada satker dilarang melakukan perikatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara apabila DIPA belum disahkan oleh menteri keuangan.

Penyusunan anggaran harus berdasarkan pada program atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh instansi. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pasal 2, RKA-K/ L terdiri atas RKA-K/L Pagu Anggaran, RKA-K/ L Alokasi Anggaran, dan RKA-K/ L APBN Perubahan.

Pemerintah memerlukan anggaran yang dapat dipergunakan untuk waktu yang akan datang. Dalam praktek penyusunan RKA-K/L, terkadang terjadi proses penganggaran yang belum memperhatikan prosedur penganggaran yang baik, seperti penyusunan RKA-K/L menggunakan data anggaran tahun sebelumnya, seharusnya RKA-K/L disusun berdasarkan rencana kegiatan instansi yang sebenarnya dilakukan di masa yang akan datang. Untuk tahun berjalan, juga memungkinkan terjadinya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah misalnya penghematan anggaran, penambahan anggaran, penerapan penghargaan, dan APBN Perubahan. Hal ini melatar belakangi munculnya revisi DIPA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menjelaskan mengenai proses Revisi DIPA Kementerian/Lembaga. Penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Prosedur Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta I”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang dari tugas akhir ini, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sebab akibat adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ?
2. Apa saja data atau dokumen yang digunakan dalam revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ?
3. Bagaimana pencatatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dilakukan?
4. Bagaimana perubahan yang terjadi pada revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dilakukan ?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ?
6. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan KPPN Jakarta I?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan memiliki tujuan yang harus dicapai. Penelitian terhadap Laporan Tugas Akhir ini pun memiliki tujuan supaya terarah dalam penerapan revisi anggaran K/L yang menggunakan aplikasi SAKTI WEB. Tujuan dari penelitian sebagai berikut

1. Menjelaskan sebab akibat adanya Revisi Daftar Isian Anggaran.
2. Menjelaskan apa saja data atau dokumen yang digunakan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
3. Menguraikan pencatatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
4. Menguraikan Perubahan perubahan yang terjadi pada saat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. Menjelaskan prosedur pelaksanaan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. Menguraikan penerapan sistem pengendalian internal pada KPPN Jakarta I.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi KPPN Jakarta I
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan saran dalam mengevaluasi proses revisi DIPA baik dalam menyempurnakan, mempertimbangkan dan mengembangkan.
2. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di Perpustakaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor terkait pembuatan karya ilmiah dalam bidang kajian yang sama.
3. Bagi Pembaca
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai revisi DIPA.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural Univer



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.